



SEKRETARIAT DAERAH KOTA BATAM

RENCANA KERJA TAHUN 2024



TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkat dan rahmat-Nya, kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah Kota Batam Tahun 2024. Rencana Kerja (RENJA) ini adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yakni sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Dokumen ini memuat rancangan kerangka prioritas dan rencana kerja pembangunan daerah beserta pendanaannya, yang diampu oleh Sekretariat Daerah.

Dengan disusunnya Rencana kerja ini diharapkan dapat menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang lebih objektif karena rencana program dan kegiatan dalam Rencana Kerja tersebut sedapat mungkin terukur dan telah memperhitungkan ketersediaan anggaran.

Selanjutnya penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah ini disadari masih banyak kekurangan, sehingga kami sangat menerima kritikan dan masukan dari berbagai pihak guna penyempurnaan penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah dikemudian hari.

Batam, Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH

KOTA BATAM



H. JEFRIDIN, M.Pd

Pembina Utama Madya

Nip. 19681225 199802 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... ii

BAB I. PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum..... 2

1.3. Maksud dan Tujuan 4

1.4. Sistematika Penulisan 5

BAB II. HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022 10

2.1. Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah 10

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 29

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 31

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 33

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 50

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 51

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional..... 51

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah..... 53

3.3. Program dan Kegiatan..... 60

BAB IV.RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH..... 78

BAB V. PENUTUP 111

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dokumen Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Batam merupakan dokumen perencanaan kerja untuk periode satu tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dan kegiatan serta penggunaan anggaran keuangan Sekretariat Daerah Kota Batam untuk Tahun 2024. Dokumen Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Batam ini berfungsi sebagai acuan kerja bagi pelaksanaan kegiatan pada tahun bersangkutan. Sebagai dokumen rencana tahunan, Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Batam mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah.

Dokumen Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2024 memuat Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah pada tahun 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah dalam rangka pencapaian visi dan misi Walikota Batam yang tentunya harus menunjang visi dan misi Pemerintah Kota Batam yang tertuang dalam dokumen RPJMD dan RKPD Kota Batam.

Dokumen Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Batam selain berpedoman pada Renstra SKPD dan RPJMD Kota Batam Tahun 2021-2026 juga harus berpedoman pada Tupoksi Sekretariat Daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2021 tentang Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Kota Batam Nomor 77 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Sekretariat daerah dan Sekretariat DPRD.

Proses penyusunan Renja SKPD dimulai dengan persiapan penyusunan Renja SKPD dengan mengumpulkan bahan

pengolahan data dan informasi serta menganalisa gambaran pelayanan SKPD untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi renja SKPD tahun lalu sesuai Renstra SKPD yang didasarkan pada penelaahan rancangan RKPD yang selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan pada penelaahan usulan kegiatan masyarakat.

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang *Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah* bahwa rencana dan target capaian program dan kegiatan selama 5 (lima) tahunan dijabarkan kembali kedalam rencana kerja untuk masa kerja 1 (satu) tahunan dengan memperhatikan dinamika yang berkembang serta permasalahan yang ada dilingkungan Birokrasi dan Masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Sekretariat Daerah Kota Batam menyusun Rancangan Rencana Kerja 1 (satu) tahunan untuk tahun 2024 berdasarkan pedoman dan aturan yang berlaku.

1.2 LANDASAN HUKUM

Peraturan Perundang-undangan yang melatar belakangi Penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Sekretariat Daerah Kota Batam Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri No.050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi , Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 01 Tahun 2021 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 10);
10. Peraturan Walikota Batam Nomor 54 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 703);
11. Peraturan Walikota Batam Nomor 65 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2024
12. Peraturan Walikota Batam Nomor 232 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Setdako Batam Tahun 2021-2026.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Renja Sekretariat Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2024 adalah untuk menyediakan suatu dokumen perencanaan dalam rangka pencapaian sasaran kinerja Sekretariat Daerah Kota Batam dengan pengalokasian anggaran secara efektif dan efisien sehingga dapat mewujudkan visi dan misi Walikota Batam yang menunjang visi dan misi Pemerintah Kota Batam. Adapun maksud dan tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024 ini diantaranya adalah:

1. Sebagai pedoman atau acuan Sekretariat Daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya guna mencapai visi dan misi Sekretariat Daerah sehingga kegiatan yang dilaksanakan lebih terarah dan konsisten sehingga target dan sasaran yang ditetapkan dapat tercapai dengan baik.

2. Sebagai tolok ukur keberhasilan capaian kinerja Sekretariat Daerah selama Tahun Anggaran 2024 dan sebagai bahan evaluasi dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan tahun berikutnya.
3. Menggambarkan capaian kinerja yang dapat ditransformasikan kedalam Renja SKPD dan Rencana Kerja Anggaran SKPD.
4. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antar perencanaan, penganggaran, serta evaluasi kegiatan.
5. Sedangkan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Batam adalah mendeskripsikan program-program prioritas yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kota Batam dan Pelaksanaan program-program tersebut sesuai dengan yang diharapkan melalui fokus pada program-program prioritas.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Batam Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang:

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah, proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Rencana Kerja K/L dan Rencana Kerja provinsi, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan

dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud Dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kota Batam.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Rencana Kerja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II: HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

Bab ini memuat tentang:

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah

ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian tentang:

1. Proses membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisa kebutuhan
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan
3. Penjelasan mengenai temuan-temuan penting terhadap perbedaan awal rancangan awal RKPD; program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di dalam rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatannya cocok namun besaran target capaian yang berbeda.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

yang menguraikan tentang:

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan. Misal:
 - a. Pencapaian visi dan misi kepala daerah,
 - b. Pencapaian SDGs,
 - c. Pengentasan kemiskinan,
 - d. Pencapaian NSPK dan SPM,
 - e. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah,
 - f. Pengembangan daerah terisolir,
 - g. Dsb.
2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
 - a. Jumlah program dan jumlah kegiatan.
 - b. Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.
3. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV:RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan rincian program dan kegiatan perangkat daerah hasil cetak dari e- planning pada tahapan RKPD

BAB V : PENUTUP

Berisikan tentang:

1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
2. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
Rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

2.1. **Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah**

Sesuai dengan Rencana Kinerja yang telah ditetapkan pada Tahun 2022, Sekretariat Daerah Kota Batam berkewajiban untuk mencapai target-target tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban Kinerja Instansi. Tolak ukur keberhasilan kinerja tersebut mengacu pada ketercapaian sasaran strategis yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sekretariat Daerah Kota Batam yaitu.

1. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah;
2. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Masyarakat Pada Kecamatan dan Kelurahan
3. Meningkatnya Akuntabilitas Penatausahaan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Batam;
4. Meningkatnya Akuntabilitas Penatausahaan Barang Milik Daerah/Aset Sekretariat Daerah Kota Batam;
5. Meningkatnya Transparansi Pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan;
6. Meningkatnya Kualitas Produk Hukum Daerah;
7. Meningkatnya peran Pemerintah dalam bidang sosial dan pembinaan keagamaan;
8. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pembangunan

Kedelapan sasaran yang ingin dicapai tersebut, pada Tahun 2022. dituangkan melalui 19 kegiatan mendasar yang secara umum pelaksanaannya sudah berjalan dengan baik dan berorientasi pada

ketercapaian sasaran dimaksud. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian Rencana Kinerja dan sebagai bahan evaluasi Akuntabilitas Kinerja pada tahun 2020, maka digambarkan capaian-capaian kinerja tersebut. Di bawah ini diuraikan hasil capaian kinerja Sekretariat Daerah Kota Batam atam dari Penetapan Kinerja yang telah ditetapkan pada Tahun 2022.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Batam dan
Pencapaian Renstra Sekretariat Daerah Kota Batam s/d Tahun 2023 Pemerintah Kota Batam

KODE	URUSAN/BIDAN G URUSAN PEMERINTAHA N DAERAH DAN PROGRAM/KEG IATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIA TAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGK AT DAERAH) TAHUN 2026	TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN 2021	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU	REALISASI 2022	TINGK AT REALI SASI (%)	TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKA T DAERAH TAHUN 2023	PERKIRAA N REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKA T DAERAH s/d TAHUN 2023		KET
						TARGET TAHUN 2022	REALISASI 2022		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN s/d TAHUN 2023	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)	
	SEKRETARIAT DAERAH										
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHA N DAERAH KABUPATEN/K OTA	1. Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Umum Sekretariat Daerah	80-90	60-70	60-70	60-70	100%	70-80	70-80		
		2. Persentase Kesesuaian PMPRB dengan Indeks RB	5%	30%	25%	25%		20%	20%		

4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tersusunnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
4.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen			
4.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan			
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
4.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	204 orang	179 orang	184 orang	184 orang	184 orang	189 orang	189 orang			
4.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	18 Kegiatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen			
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Terlaksana	100%		100%	100%	100%	100%	100%			

	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	430 Paket						430 Paket		
4.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	22 Orang	22 Orang	22 Orang				22 Orang	22 Orang	
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%				100%	100%	
4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	6 Paket	7 Paket				7 Paket	7 Paket	
4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	9 Paket	10 Paket	9 Paket				9 Paket	9 Paket	
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2 Paket	1 Paket				1 Paket	1 Paket	
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan				12 Laporan	12 Laporan	
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah Yang Terlaksana	100%	100%	100%				100%	100%	

4.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	15 Unit	15 Unit	15 Unit	15 Unit	15 Unit	15 Unit			
4.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	245 Paket	6 Paket	245 Paket	245 Paket	245 Paket	245 Paket			
4.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	160 Unit	12 Unit	160 Unit	160 Unit	160 Unit	12 Unit			
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan			
4.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan			
4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan			

4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terlaksana Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
		9 Unit						9 Unit				
4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	120 unit	9 Unit	120 unit	120 unit				120 unit		
4.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	5 Unit	10 Unit	10 Unit				10 Unit		
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Terpenuhi sesuai dengan ketentuan	100%	100%	100%	100%				100%		

4.01.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan			
4.01.01.2.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan			
4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtangga an Sekretariat Daerah	Persentase Kegiatan Kerumahtangaan Sekretariat Daerah yang Terasilitasi sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
4.01.01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	8 Paket	8 Paket	8 Paket	8 Paket	8 Paket	8 Paket	8 Paket			
4.01.01.2.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	8 Paket	8 Paket	8 Paket	8 Paket	8 Paket	8 Paket	8 Paket			
4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	1.Persentase Jumlah SOP di lingkungan Pemkot Batam yang diterapkan; 2.Persentase Jumlah PD yang memiliki PMPRB berkategori Baik ;3. Persentase Jumlah PD dengan nilai IKM berkategori Baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			

4.01.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	
4.01.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	
4.01.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	44 Dokumen	44 Dokumen	44 Dokumen	44 Dokumen	44 Dokumen	44 Dokumen	
4.01.01.2.13.04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
4.01.01.2.13.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Keprotokolan Pimpinan Daerah yang difasilitasi sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4.01.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	50 Laporan	50 Laporan	50 Laporan	50 Laporan	50 Laporan	50 Laporan	
4.01.01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	36 Laporan				36 Laporan	36 Laporan	
4.01.01.2.14.03	Pendokumentasi an Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	2 Laporan				2 Laporan	2 Laporan	

4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	1. Persentase Produk Hukum yang ditetapkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
		2. Indeks Kepuasan Layanan Kesejahteraan Rakyat	80-90	60-70	60-70	60-70	60-70	70-80	70-80		
		3. Persentase Rekomendasi Kebijakan Tata Pemerintahan yang Ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
		4. Persentase MoU yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase penyampaian laporan LPPD dan RLPPD tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
4.01.02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen		
4.01.02.2.01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		
4.01.02.2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen		
4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Cakupan lembaga keagamaan dan tokoh keagamaan yang diberikan layanan Sesuai Kebutuhan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
4.01.02.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	24 Dokumen	24 Dokumen	24 Dokumen	24 Dokumen	24 Dokumen	24 Dokumen	24 Dokumen		

4.01.02.2.02.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	200 Dokumen	200 Dokumen	200 Dokumen	200 Dokumen	200 Dokumen			
4.01.02.2.02.03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	14 Dokumen	14 Dokumen	14 Dokumen	14 Dokumen	14 Dokumen	14 Dokumen		
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	1440 Keluarga	1440 Keluarga	1440 Keluarga					

4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase produk hukum yang telah diharmonisasi dan disinkronisasikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
4.01.02.2.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	410 Dokumen		410 Dokumen	410 Dokumen	100% Dokumen		410 Dokumen		410 Dokumen	
4.01.02.2.03.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	8 Kasus	8 Kasus	8 Kasus	8 Kasus	100% Kasus		8 Kasus		8 Kasus	
4.01.02.2.03.03	Pendokumentasi an Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Didokumentasi	410 Dokumen		410 Dokumen	410 Dokumen	100% Dokumen		410 Dokumen		410 Dokumen	
4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerjasama Daerah	1. Persentase inisiasi Kerjasama yang menjadi MOU 2. Jumlah kegiatan Pembangunan Daerah yang dibiaya oleh Dana CSR"	100%	100%	100%	100%	100%		100%		100%	
4.01.02.2.04.01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100% Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen	
4.01.02.2.04.02	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	1 Dokumen						1 Dokumen		1 Dokumen	
4.01.02.2.04.03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100% Laporan		1 Laporan		1 Laporan	

4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Rekomendasi Kebijakan Layanan Perekonomian	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
		Persentase Rekomendasi Layanan Kebijakan Administrasi Pembangunan	100%	90%	90%	100%	100%	100%			
		Indeks Kepuasan Layanan Pengadaan Barang Jasa	80-90	60-70	60-70	60-70	70-80	70-80			
		Persentase Rekomendasi Kebijakan Bidang SDA yang Ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
		Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian daerah yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian										
4.01.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	6 Laporan	5 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	6 Dokumen			
4.01.03.2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4 Dokumen	4 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	4 Laporan			

4.01.03.2.01.03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	5 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen		6 Dokumen	5 Dokumen		
4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase pelaporan pelaksanaan pembangunan tepat waktu dan sesuai ketentuan	100%	90%	90%			100%	100%		
4.01.03.2.02.01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen			1 Buku	1 Dokumen		
4.01.03.2.02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan			1 Laporan	1 Laporan		
4.01.03.2.02.03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan			2 Laporan	2 Laporan		
4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Tingkat Kematangan UKPBJ (level)	80-85	Level 3 untuk 9 Variabel	Level 4 untuk 4 Variabel			Level 4 untuk 4 Variabel	70-75		
4.01.03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	400 Dokumen	500 Dokumen	400 Dokumen			400 Dokumen	400 Dokumen		
4.01.03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	50 Dokumen	50 Dokumen	50 Dokumen			50 Dokumen	50 Dokumen		

4.01.03.2.03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	450 Orang	450 Orang	450 Orang	450 Orang	450 Orang	450 Orang		
4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase rekomendasi kebijakan bidang SDA yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
4.01.03.2.04.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen		
4.01.03.2.04.02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen		

4.01.03.2.04.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	
-----------------	---	---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	--

Penjelasan Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

1.2.1 Capaian Indikator Target Kinerja

Pada hakekatnya pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang ada di Sekretariat Daerah Kota Batam setiap tahun adalah untuk mendukung peningkatan pelayanan Sekretariat Daerah baik dalam lingkup internal (SKPD) maupun eksternal (masyarakat dan pihak-pihak terkait). Berdasarkan evaluasi hasil capaian kinerja pelayanan sesuai rencana strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kota Batam, dapat dikemukakan gambaran pencapaian kinerja pelayanan Sekretariat Daerah sebagaimana dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Capaian pelaksanaan program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berisikan kegiatan Penataan Organisasi, Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah. Capaian Utama dari program ini adalah terfasilitasi nya pelayanan administrasi keuangan dan kerumahtanggaan sekretariat Daerah serta tersusunnya Dokumen Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

Untuk capaian kinerja Pemerintah Kota Batam dengan tolak ukur capaian keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan melalui evaluasi dan *penilaian oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi*. Dari hasil evaluasi dan penilaian, Pemerintah Kota Batam memperoleh penilaian “B” atau kategori “baik” mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

Implementasi dari Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan amanat Peraturan Perundang-undangan, serta sasaran program legislasi daerah yang disusun Pemerintah Kota Batam bersama DPRD Kota Batam.

Selain itu, kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum merupakan media yang dapat diakses publik secara online untuk mendapatkan referensi hukum dari produk hukum daerah berupa ringkasan, abstrak, dan katalog yang memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang produk hukum daerah.

Pelayanan Bantuan hukum litigasi dan non litigasi bertujuan untuk memberikan pendampingan hukum atas adanya gugatan/sengketa yang melibatkan Pemerintah Kota Batam sebagai institusi yang mengeluarkan produk hukum baik bersifat Perdata maupun Tata Usaha Negara. Secara umum capaian output kegiatan dapat terlaksana 100%. Terkait dengan capaian kegiatan pelayanan bantuan hukum terjadi peningkatan output 100% yang disebabkan bertambahnya kasus maupun keikutsertaan Pemerintah Kota Batam pada sidang gugatan Perdata dan Tata Usaha Negara pada tahun 2022.

Kegiatan pelaksanaan Kebijakan kesejahteraan Rakyat merupakan implementasi dari upaya meningkatkan penghayatan dan kualitas implementasi nilai-nilai keagamaan yang diakui di Indonesia bagi masyarakat dan aparatur dilingkungan Pemerintah Kota Batam. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan penghayatan nilai-nilai keagamaan adalah mempertahankan dan meningkatkan nilai-nilai keagamaan sebagai pedoman hidup masyarakat Kota Batam.

Upaya peningkatan nilai-nilai keagamaan dilakukan dengan 3 (tiga) metode pelaksanaan, yaitu:

- a. pelaksanaan peringatan hari besar keagamaan;
- b. Peningkatan kualitas lembaga keagamaan; dan
- c. Peningkatan kualitas pemuka agama dalam upaya menjalankan syiar agama sesuai dengan agama yang dianut oleh masyarakat Kota Batam.

Secara umum pelaksanaan kegiatan pada program peningkatan nilai-nilai keagamaan tercapai 100% sesuai dengan target yang ditentukan, bahkan secara kuantitatif

jumlah pemuka agama yang ditingkatkan kualitasnya mengalami peningkatan setiap tahunnya sesuai dengan data yang diverifikasi oleh Pemerintah Kota Batam.

Dalam rangka Pengembangan wawasan kebangsaan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah berupa peringatan dan seremonial hari-hari besar nasional dengan sasaran meningkatkan nilai-nilai kebangsaan melalui peringatan hari-hari besar nasional di Kota Batam. Capaian target keluaran kegiatan tercapai 100%.

Untuk Program Perekonomian dan Pembangunan Memiliki 4 kegiatan yaitu Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian, Pelaksanaan Administrasi Pembangunan, Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa dan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam. Dalam Pengendalian Inflasi di Kota Batam, Pemerintah Kota Batam membentuk Tim Monitoring yang bertugas sebagai Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kota Batam.

Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan merupakan Tim Monitoring dan Evaluasi terhadap Pembangunan Kota Batam, sebagai Pengendali Kegiatan Pemerintah Daerah. Tim Monitoring ini melaporkan kepada Walikota Batam dalam pelaksanaan Pembangunan Kota Batam.

Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa di Kota Batam merupakan Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dimana seluruh proses Pengadaan Barang dan Jasa dilakukan secara elektronik seperti layanan E-catalog Local maupun Nasional.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Batam

Tabel TC.2.2

Indikator Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

N O	TUJUAN PD	INDIKATOR TUJUAN PD	SASARAN PD	INDIKATOR SASARAN PD	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien serta penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas	Nilai LPPD			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
			Optimalnya kualitas layanan pendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretarian	82%	88.31%	89%	90%	91%	92%

			Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah daerah di lingkungan pemerintah kota Batam	Nilai SAKIP / Hasil LKJIP	B	B	B	B	BB	BB	BB
				Persentase Ketidaksesuaian PMPRB dengan Indeks RB	30%	25%	20%	15%	10%	5%	
		Indeks Kepuasan Masyarakat			82	88.31	89	90	91	92	
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan pada unit-unit pelayanan publik berbasis teknologi informasi	Persentase penerapan SOP di lingkungan pemerintah Kota Batam	80%	85%	90%	95%	100%	100%	

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Permasalahan/tantangan yang menjadi isu strategis dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah pada hakekatnya tidak terlepas dari isu strategis yang menjadi permasalahan pokok Kota Batam sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2021-2026.

Sebagai pertimbangan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024, perlu dilakukan reviu terhadap pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya n-2 (2022). Sebagai dasar analisa pencapaian Rencana Kerja, reviu dilakukan atas Perencanaan program dan Kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi serta capaian-capaian target pada tahun ke-4 dari RPJMD dan Renstra Sekretariat Daerah Kota Batam 2021-2026.

Sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan rencana kerja (Rencana Kerja) tahun 2024, beberapa Isu-isu strategis yang perlu mendapatkan perhatian adalah:

1. Dari hasil verifikasi dan evaluasi terhadap Rencana Kerja Tahun 2021 dan 2022 terdapat beberapa kegiatan yang perlu dilakukan perubahan terkait penamaan/nomenklatur mengingat tugas Sekretariat Daerah sebagai OPD yang membantu Kepala Daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah. Pada Bagian Perekonomian dan SDA yaitu a. semula pada kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan TPID di ubah menjadi Perumusan Kebijakan Pengendalian Inflasi, b. semula Fasilitasi dan Pelaksanaan Kerjasama Forum, Tanggungjawab Sosial Perusahaan TSP/ Kota Batam diubah menjadi Sinkronisasi dan Sinergisitas Tanggungjawab Sosial (TSP) Kota Batam dan Pemerintah Kota Batam. Dan ada 2 (dua) penambahan kegiatan yang pada tahun 2021 kegiatan ini tidak dilaksanakan yaitu a. kegiatan Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Bidang Perindag,

Naker, Pariwisata dan Kebudayaan, b. kegiatan Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Bidang Ketahanan Pangan, Perikanan, energi dan Lingkungan Hidup dan SDA.

2. Pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dilakukan Perubahan nama/nomenklatur kegiatan semula Koordinasi dan Asistensi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berubah menjadi Asistensi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
3. Pada Bagian Humas untuk Dokumentasi Kegiatan Keagamaan, Kepemerintahan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur berubah dan Pengembangan Sumberdaya Informasi serta Dokumentasi Kehumasan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang melekat pada Dinas Komunikasi dan Informatika maka kegiatan tersebut dialihkan dan tidak menjadi tanggungjawab Bagian Humas.
4. Dalam rangka mengantisipasi perubahan pada data awal usulan calon penerima insentif guru TPQ se-kota Batam pada Bagian Kesra yang semula pada kegiatan Pelatihan dan Pembinaan Kelembagaan Keagamaan dilakukan penambahan kegiatan menjadi Pembinaan Badan Musyawarah Guru Al-Quran dengan pertimbangan kegiatan yang dimaksud memiliki tujuan dan sasaran yang berbeda dan memiliki indikator yang berbeda.

Pada Bagian Tata Pemerintahan terdapat penambahan kegiatan yaitu Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Pemerintah Kota Batam yang bertujuan untuk penambahan sarana dan prasarana Pendukung Kegiatan pada sekretariat Daerah sehingga diperlukan penambahan biaya untuk mendukung pelaksanaan tersebut.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

TABEL 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Sekretariat Daerah Kota Batam

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat Penti ng
	Program /Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA A		1. Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Umum Sekretariat Daerah	70-80	126.749.463.927	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		1. Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Umum Sekretariat Daerah	70-80	134.665.933.519	
			2. Persentase Kesesuaian PMPRB dengan Indeks RB	15%				2. Persentase Kesesuaian PMPRB dengan Indeks RB	15%		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Tersusunnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	136.990.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Tersusunnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	301.348.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun	1 Dokumen	95.966.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun	1 Dokumen	143.409.000	

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	41.024.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	157.939.000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	45.305.919.929,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	45.342.035.929	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	194 Orang	45.069.539.929,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	194 Orang	45.105.655.929	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi i Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	236.380.000,00	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	236.380.000	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Terlaksana	100%	758.986.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Terlaksana	100%	846.186.000	

Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	430 Paket	587.200.000		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	22 Orang	258.986.000		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	20.854.251.500		Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	4.162.918.000		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	9 Paket	9.046.946.000		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	981.000.000		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	6.663.387.500		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Yang Terlaksana	100%	3.622.598.000					
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	15 Unit	2.622.598.000					
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	245 Paket	295.908.000					
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	160 Unit	921.640.000					
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	24.921.551.692					
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	9.505.630.000					

	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	658,250,000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	773.500.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	15,112,220,800	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	14.642.421.692	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terlaksana	100%	23,218,569,556	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terlaksana	100%	25.316.412.556	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	9 Unit	351,760,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	9 Unit	351.760.000	

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	120 Unit	14,598,251,750	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Perizinannya	120 Unit	16.768.503.750	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	8,268,557,806	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	8.196.158.806	
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Terpenuhi sesuai dengan ketentuan	100%	5,555,127,042	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Terpenuhi sesuai dengan ketentuan	100%	5.740.127.042	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	3,955,127,042	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	3.955.127.042	

	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	1,600,000,000	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	1.785.000.000		
	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Kegiatan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah yang Terfasilitasi sesuai ketentuan	100%	4,567,078,000	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Kegiatan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah yang Terfasilitasi sesuai ketentuan	100%	4.802.845.800		
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	8 Paket	2,580,077,000	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	8 Paket	2.701.484.400		
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	8 Paket	1,987,001,000	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	8 Paket	2.101.361.400		
	Penataan Organisasi	1.Persentase Jumlah SOP di lingkungan Pemkot Batam yang diterapkan; 2.Persentase Jumlah PD yang memiliki PMPRB kategori Baik	100%	1,906,831,000	Penataan Organisasi	1.Persentase Jumlah SOP di lingkungan Pemkot Batam yang diterapkan; 2.Persentase Jumlah PD yang memiliki PMPRB kategori Baik	100%	2.126.602.000		

			3. Persentase Jumlah PD dengan nilai IKM baik					3. Persentase Jumlah PD dengan nilai IKM baik				
	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan		Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	403,448,000	4 Dokumen		Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	471.863.000	4 Dokumen			
	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	311,401,500	3 Laporan		Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	416.706.000	3 Laporan			
	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi		Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	216,109,000	44 Dokumen		Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	131.854.000	44 Dokumen			
	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	700,081,500	1 Dokumen		Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	886.749.000	1 Dokumen			
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	275,791,000	1 Dokumen		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	219.430.000	1 Dokumen			

	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Keprotokolan Pimpinan Daerah yang difasilitasi sesuai ketentuan	100%	541,370,000	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Keprotokolan Pimpinan Daerah yang difasilitasi sesuai ketentuan	100%	791.975.000	
	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	50 Laporan	302,025,000	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	50 Laporan	598.175.000	
	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	36 Laporan	206,500,000	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	36 Laporan	181.450.000	
	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	2 Laporan	32,845,000	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	2 Laporan	12.350.000	
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	1. Persentase Produk Hukum yang ditetapkan	100%	99,546,467,510	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	1. Persentase Produk Hukum yang ditetapkan	100%	110.513.314.900	
		2. Indeks Kepuasan Layanan Kesejahteraan Rakyat	70-80			2. Indeks Kepuasan Layanan Kesejahteraan Rakyat	70-80		
		3. Persentase Rekomendasi Kebijakan Tata Pemerintahan yang Ditindaklanjuti	100%			3. Persentase Rekomendasi Kebijakan Tata Pemerintahan yang Ditindaklanjuti	100%		
		4. Persentase MoU yang ditindaklanjuti	100%			4. Persentase MoU yang ditindaklanjuti	100%		
	Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase penyampaian laporan LPPD dan RLPPD tepat waktu	100%	5,795,354,000	Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase penyampaian laporan LPPD dan RLPPD tepat waktu	100%	7.884.039.500	

Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	12 Dokumen	2,452,177,000	Penataan Administrasi Pemerintahan		Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	12 Dokumen	2,599,994,000	
Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1 Dokumen	164,070,000	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1 Dokumen	1,020,429,500	
Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	2 Dokumen	3,179,107,000	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	2 Dokumen	4,263,616,000	
Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Cakupan lembaga keagamaan dan tokoh keagamaan yang diberikan layanan Sesuai Kebutuhan	100%	88,857,059,010	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		Persentase Cakupan lembaga keagamaan dan tokoh keagamaan yang diberikan layanan Sesuai Kebutuhan	100%	97,435,530,400	
Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	24 Dokumen	56,010,026,000	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	24 Dokumen	61,010,026,000	

	Pelaksanaan Kebijakan, dan Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	200 Dokumen	23,287,155,000	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	200 Dokumen	22.435.260.000	
	Pelaksanaan Kebijakan, dan Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	14 Dokumen	7,333,961,010	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	14 Dokumen	11.764.327.400	

Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	1440 Keluarga	2,225,917,000	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	1440 Keluarga	2.225.917.000	
Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase produk hukum yang telah diharmonisasi dan disinkronisasikan	100%	371,569,500	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase produk hukum yang telah diharmonisasi dan disinkronisasikan	100%	371.385.000	
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	410 Dokumen	9,975,000	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	410 Dokumen	9.815.000	
Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	8 Kasus	350,174,000	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	8 Kasus	350.174.000	
Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	410 Dokumen	11,420,500	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	410 Dokumen	11.396.000	

		Persentase Rekomendasi Kebijakan Bidang SDA yang Ditindaklanjuti	100%			Persentase Rekomendasi Kebijakan Bidang SDA yang Ditindaklanjuti	100%		
	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian daerah yang ditindaklanjuti	100%	555,348,000	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian daerah yang ditindaklanjuti	100%	555.348.000	
	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	6 Dokumen	95,974,000	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	6 Dokumen	95.974.000	
	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4 Laporan	370,610,000	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4 Laporan	370.610.000	
	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	5 Dokumen	88,764,000	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	5 Dokumen	88.764.000	
	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase pelaporan pelaksanaan pembangunan tepat waktu dan sesuai ketentuan	100%	165,180,000	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase pelaporan pelaksanaan pembangunan tepat waktu dan sesuai ketentuan	100%	311.621.000	

Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	1 Buku	45,480,000	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	1 Buku	109.945.000	
Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	1 Laporan	100,800,000	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	1 Laporan	190.945.000	
Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	2 Laporan	18,900,000	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	2 Laporan	11.226.000	
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Indeks Tata Kelola Pengadaan	75-80	630,398,600	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Tingkat Kematangan UKPBJ (level)	75-80	690.535.200	
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	400 Dokumen	48,850,000	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	400 Dokumen	20.545.000	
Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	50 Dokumen	474,082,600	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	50 Dokumen	562.543.200	
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	450 Orang	107,466,000	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	450 Orang	107.447.000	

Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase rekomendasi kebijakan bidang SDA yang ditindaklanjuti	100%	40,327,250	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase rekomendasi kebijakan bidang SDA yang ditindaklanjuti	100%	40.285.000	
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	5 Dokumen	14,360,750	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	5 Dokumen	14.300.000	
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	5 Dokumen	12,425,750	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	5 Dokumen	12.435.000	

	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanian	5 Dokumen	13,540,750	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanian	5 Dokumen	13.550.000	
--	---	--	-----------	------------	---	--	-----------	------------	--

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

TABEL 2.4
Usulan Program dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Sekretariat Daerah Kota Batam

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	cat
1	2	3	4	5	6
1	-	-	-	-	-

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Penetapan program strategis dalam Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Batam Tahun 2024 ini disamping berpedoman pada program strategis dalam RPJMD Kota Batam Tahun 2021-2026 dan RKPD Kota Batam Tahun 2024, juga memperhatikan berbagai program nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) setiap tahun.

Tabel di bawah ini menjelaskan tentang isu-isu strategis dilihat dari sisi isu internasional, Nasional, lokal, dan janji politik Walikota-Wakil Walikota Batam.

No	Tingkat Isu	Isu Strategis Pembangunan Daerah	Faktor Penentu Keberhasilan
1.	Internasional	Adaptasi terhadap Era Normal Baru Pasca Wabah Covid-19	• Respon dalam mengadaptasi protokol kesehatan dan kebiasaan baru yang muncul; • Sensitivitas atas perubahan kondisi lingkungan yang mempengaruhi masyarakat • Pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung aktivitas pembangunan • Peningkatan infrastruktur dalam meningkatkan ketahanan terhadap wabah global
	Nasional		
	Daerah		
2.	Daerah	Meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	• Mengendalikan pertumbuhan penduduk dan memperkuat tata kelola kependudukan • Memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial • Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta • Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas • Pengentasan kemiskinan • Meningkatkan produktivitas, kompetensi, dan daya saing tenaga kerja • Memanfaatkan bonus demografi
3.	Nasional	Reformasi Birokrasi	• Menguatkan komitmen pimpinan dalam mengerjakan <i>ownership</i> pegawai terhadap organisasi; • Implementasi reformasi birokrasi sampai unit kerja;

	Daerah		• Pilihlah program dan kegiatan yang bersifat problem solving; • Peningkatan kualitas manajemen reformasi birokrasi (<i>plan, do, act, check</i>)
4.	Nasional	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	• Pengembangan wilayah hinterland • Pengembangan sentra industri dan usaha kecil yang terintegrasi dengan rantai pasok industri • Pemerataan infrastruktur dasar
5.	Daerah	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	• infrastruktur perhubungan dan transportasi • Peningkatan sistem transportasi Perkotaan • Energi dan listrik yang berkelanjutan • Infrastruktur dan ekosistem teknologi informasi • Akses air bersih
6.	Internasional	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	• Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup • Optimalisasi Ruang Terbuka Hijau • Kelembagaan dan infrastruktur Penanggulangan Bencana dan Ketahanan Iklim • Penanganan Limbah dan Persampahan
	Nasional		
	Daerah		
7.	Daerah	Mewujudkan Batam sebagai Bandar Berstandar Internasional	• Pembangunan Sarana dan Prasarana yang memadai • Optimalisasi penataan ruang • Pengembangan jaringan kerja sama dengan bandar-bandar lain di negara lain • Peningkatan kualitas daya dukung lingkungan
8.	Nasional	Menciptakan Batam sebagai salah satu Pusat Pertumbuhan Ekonomi Nasional	• Koordinasi Pemerintah Kota Batam dengan Badan Pengelola Batam • Pengembangan Teknologi Informasi • Sinergi antara pusat pertumbuhan dengan daerah <i>hinterland</i> • Pengembangan IKM sebagai pendukung rantai pasok industri
	Daerah		
9.	Nasional	Pembangunan Gender dan Pemberdayaan Kelompok Difabel dan Kelompok Rentan	• Peningkatan pengawasan dan pengendalian dalam program-program pembangunan gender, pemberdayaan difabel dan kelompok rentan • Peningkatan partisipasi perempuan dan kelompok marjinal dalam pembangunan • Pembangunan infrastruktur yang ramah perempuan, anak, kelompok difabel dan rentan;
	Daerah		

			• Pemberian hak pekerjaan, kewirausahaan dan koperasi pada kelompok difabel, serta memberi insentif bagi pemberi kerja pada kelompok difabel
10.	Daerah	Peluang Pembiayaan Pembangunan Non APBD	•Mengupayakan peluang pembiayaan melalui KPBU, PHLN, skema Obligasi, pinjaman melalui BPD/ PT.SMI dan optimalisasi peran CSR disesuaikan dengan kebutuhan riil masyarakat

Nasional yang berkaitan dengan fungsi dan tugas Sekretariat Berdasarkan isu-isu strategis di atas, maka perlu pula di telaah kembali lebih detail terkait isu nasional tentang arah kebijakan pembangunan Daerah Kota Batam.

Mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2024 bahwa pemerintah memprioritaskan 4 kegiatan terkait program prioritas Reformasi Birokrasi, dengan dasar penetapan yaitu efisiensi tata laksana penyelenggaraan pemerintah, peningkatan kualitas pelayanan publik, perwujudan birokrasi yang efektif dan efisien, serta peningkatan integritas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

3.2. Tujuan Dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Kota Batam, maka telah ditetapkan tujuan dan sasaran strategis yang akan dicapai oleh Sekretariat Daerah Kota Batam.

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Sekretariat Daerah Kota Batam melalui bagian-bagian dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahunan. Sedangkan sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Sekretariat Daerah Kota Batam dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Tujuan dan sasaran merupakan tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah. Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi Walikota Batam yaitu Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang profesional bersifat *entrepreneur* dan dinamis dengan mengedepankan prinsip *good governance* dan *clean goverment* yang Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting

penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

Berikut ini penjabaran sasaran kegiatan prioritas mengacu kepada Isu Isu Strategis Perangkat Daerah 2024.

**Pemetaan Permasalahan Pelayanan
Perangkat Daerah Kota Batam**

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar masalah
1.	Pertumbuhan ekonomi yang kurang stabil dan mengalami kontraksi pada tahun 2020	Diversifikasi sumber pertumbuhan ekonomi belum optimal, Menurunnya pertumbuhan sektor ekonomi sebagai dampak Pandemi Covid-19	Perekonomian terlalu bertumpu pada industri besar yang ada di kawasan industri sehingga pengembangan sektor ekonomi lain belum optimal. Pembatasan hamper seluruh kegiatan masyarakat sebagai bentuk penanganan Pandemi Covid-19.
2.	Tingginya Laju Inflasi	Meningkatnya harga pada kelompok barang penyumbang inflasi terutama dari kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan.	Masih belum optimalnya pengelolaan keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, komunikasi yang efektif dalam mengendalikan harga.
3.	Masih tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Rendahnya serapan pasar tenaga kerja di Kota Batam	Kesesuaian kompetensi tenaga kerja serta <i>link & match</i> antara institusi pendidikan dengan dunia usaha dan dunia industri
4.	Jumlah penduduk miskin Kota Batam tinggi dan meningkat, penyumbang terbesar penduduk miskin di Provinsi Kepulauan Riau	Daya tarik kota membuat arus urbanisasi tidak gampang dibendung, sementara ketersediaan lapangan kerja di kota terbatas. Jika pun ada, maka lebih ke sektor informal dengan pendapatan terbatas	Belum optimalnya pengelolaan terhadap urbanisasi maupun pelayanan sosial terhadap kelompok rentan.
5.	Indeks Gini perlu terus diturunkan pada tingkat pendapatan per kapita masyarakat yang tinggi	Gencarnya Bantuan social bagi masyarakat rentan dan dampak negative pandemi covid-19 bagi masyarakat kaya mungkin mampu menurunkan Indeks Gini, namun pada tingkat rata-rata pendapatan masyarakat yang rendah	Pembatasan aktifitas masyarakat sebagai upaya penanganan pandemic covid-19 membuat aktifitas perekonomian terganggu dan di periode tertentu terhenti. Adaptasi “new normal” agar masyarakat tetap aman beraktifitas selama pandemi maupun pasca pandemic masih belum optimal.
6.	Ketimpangan antar wilayah, khususnya antar <i>mainland</i> (perkotaan) dan <i>hinterland</i>		
a.	Kualitas pelayanan Pendidikan dan	Kapasitas pelayanan Pendidikan SD-SMP, serta	Masih belum tercukupinya daya tampung sarana dan

	Kesehatan belum merata	kapasitas pelayanan Kesehatan masih belum sesuai standar;	prasarana pelayanan Pendidikan dan Kesehatan, serta belum tercukupinya jumlah tenaga pendidik dan tenaga Kesehatan serta tenaga pendukungnya.
b.	Kualitas infrastruktur belum merata, khususnya antara <i>mainland</i> dan <i>hinterland</i>	Pemenuhan hunian vertikal untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) masih kurang	Sulitnya penyediaan lahan untuk pemenuhan hunian vertikal untuk MBR, pemanfaatan anggaran selain APBD untuk penyediaan lahan dan pembangunan hunian vertikal belum dioptimalkan.
		Pemenuhan perumahan di wilayah <i>hinterland</i> belum optimal	Kendala penyediaan lahan dan potensi pembiayaan selain APBD belum dioptimalkan.
		Rasio Panjang jalan terhadap jumlah kendaraan rendah	Masih kurangnya moda transportasi massal yang handal memicu pertambahan kendaraan bermotor, sehingga penurunan rasio Panjang jalan terhadap jumlah kendaraan cukup tinggi. Pembangunan transportasi massal merupakan pendekatan <i>green infrastructure</i> yang dapat menekan produksi asap kendaraan bermotor, selain itu pembangunan transportasi massal akan lebih banyak menyerap tenaga kerja dibandingkan dengan hanya pembangunan/penambahan panjang jalan.
		Kualitas permukaan jalan (kondisi mantap) masih perlu dioptimalkan	Laju penurunan kualitas permukaan jalan belum diimbangi dengan tingkat pemeliharaan jalan
		Ketersediaan air bersih belum merata antara wilayah <i>mainland</i> dengan <i>hinterland</i>	Faktor geografis kepulauan dan jenis struktur tanah berimplikasi pada sulitnya ketersediaan air tanah, serta faktor iklim yang berdampak pada kekeringan. Selain itu masih kurangnya sumber-sumber penampung air bersih beserta jaringan pipa distribusi air. 7 Meskipun IPM meningkat namun peringkat nasional IPM Kota Batam menurun Konsumsi riil per kapita menurun, indeks pendidikan masih di angka 73,69 (dari maks 100) dan indeks kesehatan di angka 0,8205 (dari maks 1) Belum merata dan tingginya kualitas

7.	Meskipun IPM meningkat namun peringkat nasional IPM Kota Batam menurun	Konsumsi riil per kapita menurun, indeks pendidikan masih di angka 73,69 (dari maks 100) dan indeks kesehatan di angka 0,8205 (dari maks 1)	Belum merata dan tingginya kualitas layanan kesehatan maupun pendidikan. Pandemi covid-19 menyebabkan daya beli masyarakat menurun. Adaptasi new normal belum terimplementasikan.
8.	Tata kelola pemerintahan belum optimal		
a.	Indeks reformasi birokrasi masih rendah	Tata kelola pemerintahan, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan (monev) penyelenggaraan urusan pemerintahan maupun pengelolaan keuangan daerah masih terbatas	Masih terbatasnya kualitas ASN, tingkat maturitas SPIP, dan manajemen pendukung Penyelenggaraan pemeritahan
b.	Kualitas pelayanan di tingkat kecamatan belum merata	Area pelayanan di beberapa kecamatan sangat besar sehingga tidak efektif dalam menjangkau masyarakat	Faktor demografis pertumbuhan penduduk di suatu kecamatan belum di imbangi dengan pemekaran kecamatan sehingga menjauhkan pelayanan kepada masyarakat
c.	Kontraksi PAD saat pandemi covid-19	Turunnya pendapatan yang bersumber dari pajak akibat pandemi covid-19	Aktifitas perekonomian terganggu akibat upaya penanganan covid-19, sementara adaptasi “new normal” belum terimplementasi dengan baik.
9.	Kinerja pemberdayaan gender Kota Batam lebih rendah dari nasional dan Kepulauan Riau	Pembangunan gender belum menjadi prioritas.	Upaya pengarusutamaan gender terbatas. Anggaran responsive gender di perangkat daerah masih terbatas.
10.	Belum optimalnya pengembangan industri kecil dan menengah	Belum optimalnya partisipasi IKM dalam rantai pasok industri	Daya saing IKM yang masih rendah

Sumber: Hasil analisis

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga menjadi indikator makro pembangunan yang dipergunakan secara nasional. Indeks ini memperlihatkan tingkat keberhasilan pembangunan manusia di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Meskipun secara umum IPM Kota Batam relatif tinggi dibandingkan nasional dan Kepulauan Riau – bahkan tertinggi di antara kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau, namun peningkatan layanan untuk kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat adalah kewajiban pemerintah daerah. Meskipun demikian, ternyata peringkat IPM Kota Batam secara nasional di tahun 2020 memburuk. Jika pada tahun 2019 Kota Batam berada di peringkat 15, namun tahun 2020 melorot ke peringkat 23 nasional. Karenanya, IPM Kota Batam harus terus ditingkatkan dengan percepatan yang tidak kalah dengan daerah lain di

Indonesia, sehingga pembangunan manusia akan tetap menjadi prioritas pembangunan Kota Batam di masa mendatang.

Kinerja tata kelola pemerintahan juga menjadi hal krusial dalam menentukan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang baik. Tata kelola pemerintah yang baik setidaknya dapat memberikan jaminan pada penyelenggaraan urusan pemerintahan secara efektif dan efisien dan selanjutnyadiharapkan mampu meningkatkan kinerja perangkat daerah pada khususnya dan penyelenggara pemerintahan daerah pada umumnya. Ukuran kinerja tata kelola pemerintahan adalah Indeks Reformasi Birokrasi (IRB). Di tahun 2020, IRB Kota Batam sebesar 52,33 berpredikat CC atau terkategori cukup baik (memadai). Dengan predikat ini pemerintah Kota Batam masih harus meningkatkan kualitas tata kelolanya menuju predikat AA atau berkategori memuaskan dengan angka di atas 85.

Kinerja tatakelola pemerintahan lainnya juga bisa dilihat dari indikator indekskepuasan masyarakat (IKM) terhadap layanan publik penyelenggara pemerintahan daerah. IKM 64 perangkat daerah di Kota Batam tahun 2020 sebesar 81,61, angka yang perlu terus ditingkatkan seoptimal mungkin. Selain itu, variasi IKM antar perngkat daerah cukup tinggi, terendah sebesar 63,8 dan tertinggi sebesar 93,0. Kondisi ini memperlihatkan bahwa pemerintah Kota Batam harus terus meningkatkan kualitas pelayanan publiknya sehingga kepuasan masyarakat meningkat dan merata di seluruh penyelenggara urusan pemerintahan.

Kinerja tata kelola keuangan daerah pun harus ditingkatkan. Pandemi covid-19 telah menyebabkan kontraksi Penerimaan Asli Daerah (PAD) yang cukup besar sehingga cukup mempengaruhi kondisi kemampuan keuangan daerah. Pengelolaan pajak daerah, sebagai sumber terbesar PAD harus ditingkatkan agar kemampuan fiskal daerah meningkat dalam membangun Kota Batam.

Permasalahan pembangunan daerah lintas sektor di Kota Batam juga menjadi permasalahan makro daerah. Pembangunan gender selama ini belum mendapatkan prioritas yang cukup dalam pembangunan daerah Kota Batam salah satunya ditunjukkan dengan pengukuran Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Meskipun dalam tiga tahun terakhir, skor IDG di Kota Batam mengalami tren kenaikan, namun skor IDG tersebut masih lebih rendah dibandingkan IDG Provinsi Kepulauan Riau dan

Nasional. Selain itu, isu gender merupakan salah satu isu utama dalam pembangunan, khususnya pembangunan sumber daya manusia. Pembangunan nasional bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mewujudkan kesejahteraan rakyat. Peningkatan kualitas SDM sebagai salah satu kunci keberhasilan pembangunan disesuaikan dengan keberagaman aspirasi dan hambatan kemajuan kelompok masyarakat laki-laki dan perempuan. Proses ini memerlukan suatu strategi yang menempatkan rakyat pada posisi aktif sebagai aktor pembangunan. Memerankan rakyat sebagai aktor berarti memerankan perempuan dan laki-laki sebagai aktor. Filosofi ini yang kemudian diterapkan dalam program pembangunan melalui strategi pengarusutamaan gender dalam pembangunan.

Permasalahan pembangunan lintas sektor lainnya adalah permasalahan Industri Kecil Menengah (IKM) yang dipercaya memiliki peran yang strategis dalam perekonomian nasional dan daerah. IKM memiliki jumlah yang besar dan menyumbang penyerapan tenaga kerja industri yang sangat besar. Disamping itu IKM juga memiliki ragam produk yang sangat banyak, mampu mengisi wilayah pasar yang luas, dan menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat luas serta memiliki ketahanan terhadap berbagai krisis yang terjadi. Dengan karakteristik tersebut, maka tumbuh dan berkembangnya IKM akan memberikan andil yang sangat besar dalam mewujudkan ekonomi nasional dan daerah yang tangguh, dan maju yang berciri kerakyatan.

Pandemi covid-19 yang terjadi sejak akhir tahun 2019 di dunia dan awal tahun 2020 di Indonesia telah menyebabkan perekonomian terpuruk, tidak terkecuali sektor IKM ini. Dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi, maka pengembangan IKM diharapkan akan meningkatkan jumlah unit usaha IKM rata-rata sebesar 1 persen per tahun atau sekitar 30 ribu unit usaha IKM per tahun dan peningkatan penyerapan tenaga kerja rata-rata sebesar 3 persen per tahun secara nasional. Pengembangan IKM di Kota Batam perlu mengacu pada sasaran nasional tersebut untuk mendukung pengembangan IKM secara nasional. Dari sisi kelembagaan, diharapkan terbentuknya sentra IKM serta UPT terkait yang mampu menyediakan penyuluh dan konsultan pengembangan IKM. Dari sisi fasilitas, peningkatan kompetensi SDM, fasilitas produksi dan permodalan perlu diupayakan untuk meningkatkan daya saing IKM di daerah.

Di samping itu juga memperhatikan posisi Wali Kota Batam sebagai *Ex-Officio* Kepala Badan Pengusahaan Batam sesuai amanat PP Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam memberikan nilai lebih tersendiri dalam proses pembangunan Kota Batam.

3.3. Program dan Kegiatan

Dalam Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Batam terdiri dari 3 Program Pembangunan, 19 Kegiatan dan 56 Sub Kegiatan. Jumlah Usulan Anggaran Rencana Kerja setda Tahun 2024 sebesar Rp. 246.777.037.619,- sesuai dengan table berikut :

Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Kota Batam

Table 3.3
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024, Perkiraan Maju Tahun 2025

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Cat Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Program Penunjang Urusan Daerah Kabupaten Kota	1. Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Umum Sekretariat Daerah 2. Persentase Kesesuaian PMPRB dengan Indeks RB	Batam	70-80 15%	134.665.933.519		70-80 15%	153.824.830.044
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tersusunnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Batam	100%	301.348.000		100%	249.585.961
	Penyusunan Dokumen	Jumlah Dokumen	Batam	1 Dokumen	143.409.000		1 Dokumen	153.910.161

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Cat Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Perencanaan Perangkat Daerah	Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun							
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Batam	1 Laporan	157.939.000		1 Laporan	95.675.800	
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Terpenuhi	Batam	100%	45.342.035.929		100%	51.562.239.785	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Batam	194 Orang/Bulan	45.105.655.929	184 Orang/Bulan	1 Tahun	51.123.952.109	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Batam	12 Dokumen	236.380.000	236.380.000	19 Dokumen	438.287.676	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Cat Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Terlaksana	Batam	100%	846.186.000		100%	1.649.768.756
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Batam	415 Paket	587.200.000		430 Paket	788.510.000
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Batam	22 Orang	258.986.000		22 Orang	861.258.756
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Batam	100%	20.854.251.500		100%	19.727.399.358
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Batam	7 Paket	4.162.918.000		7 Paket	2.334.964.936
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Batam	9 Paket	9.046.946.000		9 Paket	4.210.313.057

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Cat Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Batam	1 Paket	981.000.000		1 Paket	782.867.536	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Batam	12 Laporan	6.663.387.500		12 Laporan	12.399.253.829	
5.	Penggandaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Kegiatan Penggadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah Yang Terlaksana	Batam	100%	3.622.598.000		100%	9.491.294.921	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Batam	15 Unit	3.086.557.400		15 Unit	2.232.421.851	
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Batam	115 Unit	295.908.000		245 Unit	1.549.222.861	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Batam	50 Unit	921.640.000		160 Unit	5.709.650.209	
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Batam	100%	24.921.551.692		100%	28.581.182.941	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Cat Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Batam	12 Laporan	9.505.630.000		12 Laporan	9.244.295.619
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Batam	6 Laporan	773.500.000		12 Laporan	4.380.598.670
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Batam	12 Laporan	14.642.421.692		12 Laporan	14.956.288.652
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terlaksana	Batam	100%	25.316.412.556		100%	26.341.125.841
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Batam	6 Unit	351.760.000		9 Unit	351.760.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Cat Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Batam	120 Unit	16.768.503.750		120 Unit	12.506.086.706
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilit asi	Batam	10 Unit	8.196.148.806		10 Unit	13.483.279.135
8.	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yaang Terpenuhi sesuai dengan ketentuan	Batam	100%	5.740.127.042		100%	6.281.014.862
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Batam	2 Orang/Bula n	3.955.127.042		2 Orang/Bula n	3.947.409.177
	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Batam	2 Orang/Bula n	1.785.000.000		2 Orang/Bula n	2.333.605.685

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Cat Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Kegiatan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah yang Terasilitasi sesuai ketentuan	Batam	100%	4.802.845.800		100%	4.661.997.212
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Batam	8 Paket	2.701.484.400		8 Paket	2.652.383.777
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Batam	8 Paket	2.101.361.400		8 Paket	2.009.613.435
10.	Penataan Organisasi	1. Persentase Jumlah SOP di lingkungan Pemkot Batam yang diterapkan; 2. Persentase Jumlah PD yang memiliki PMPRB berkategori Baik; 3. Persentase Jumlah PD dengan nilai IKM berkategori Baik	Batam	100%	2.126.602.000		100%	2.637.930.600

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Cat Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Batam	4 Dokumen	471.863.000		4 Dokumen	710.891.100
	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah laporan hasil fasilitasi pelayanan Publik dan Tata Laksana;	Batam	3 Laporan	416.706.0000		3 Laporan	651.410.600
	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Batam	44 Dokumen	131.854.000		44 Dokumen	195.211.600
	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Batam	1 Dokumen	886.749.000		1 Dokumen	788.694.100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Batam	1 Dokumen	219.430.000		1 Dokumen	291.723.200

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Cat Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
11	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Keprotokolan Pimpinan Daerah yang difasilitasi sesuai ketentuan	Batam	100%	791.975.000		100%	2.641.289.807	
	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan kepala/wakil kepala daerah	Batam	50 Laporan	598.175.000		50 Laporan	2.016.440.000	
	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Batam	36 Laporan	181.450.000		36 Laporan	500.421.807	
	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Batam	2 Laporan	12.350.000		2 Laporan	124.428.000	
II	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	1. Persentase Produk Hukum yang ditetapkan 2. Indeks Kepuasan Layanan Kesejahteraan Rakyat 3. Persentase Reomendasi	Batam	100%	110.513.314.900		100%	89.802.088.501	
				70-80			70-80		
				100%			100%		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Cat Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		kebijakan Tata Pemerintahan yang ditindaklanjuti 4. Persentase MoU yang ditindaklanjuti Persentase penyampaian laporan LPPD dan RLPPD tepat waktu;		100%			100%	
1	Adminitrasi Tata Pemerintahan		Batam	100%	7.884.039.500		100%	7.559.986.635
	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintah	Batam	12 Dokumen	2.599.994.000		12 Dokumen	2.933.353.824
	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan kecamatan perbatasan.	Batam	1 Dokumen	1.020.429.500		1 Dokumen	850.703.377
	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Batam	2 Dokumen	4.263.616.000		2 Dokumen	3.775.929.434
2.	Pelaksanaan Kebijakan Kesjahteraan Rakyat	Persentase Cakupan Lembaga keagamaan dan tokoh keagamaan yang diberikan layanan Sesuai Kebutuhan	Batam	100%	97.435.530.400		100%	80.715.464.348

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Cat Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Batam	24 Dokumen	61.010.026.000		24 Dokumen	43.436.051.937
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang meliputi urusan Sosial , Transmigrasi, Kesehatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Batam	200 Dokumen	22.435.260.000		200 Dokumen	20.140.587.985

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Cat Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan masyarakat yang meliputi Urusan Kepemudaan dan olahraga, Pariwisata, Pendidikan Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Batam	14 Dokumen	11.764.327.400		14 Dokumen	14.750.668.428
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam membangun kerjasama antar-keluarga, warga, dn kelompok masyarakat	Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerjasama antar- keluarga, warga, dan kelompok masyarakat	Batam	1440 Keluarga	2.225.917.000		1440 Keluarga	2.388.156.000
3	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase produk hukum yang telah diharmonisasi dan disinkronisasikan	Batam	100%	371.385.000		100%	595.625.099

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Cat Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang disusun	Batam	410 Dokumen	9.815.000		410 Dokumen	1.749.436
	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Batam	8 Kasus	350.174.000		8 Kasus	591.817.993
	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang di Dokumentasi	Batam	410 Dokumen	11.396.000		410 Dokumen	2.057.670
4	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Persentase Fasilitas Kerjasama Daerah	Batam	100%	4.822.360.000		100%	931.012.419
	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Batam	1 Dokumen	4.783.210.000		1 Dokumen	509.622.562

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Cat Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Batam	1 Dokumen	1.550.000		1 Dokumen	322.144.092
	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Batam	1 Laporan	37.600.000		1 Laporan	99.245.765
III	Program Perekonomian dan Pembangunan	1. Persentase rekomendasi Kebijakan Layanan Perekonomian		100%			100%	
		2. Persentase rekomendasi Layanan Kebijakan Administrasi		100%			100%	
		3. Indeks Kepuasan Layanan Pengadaan Barang Jasa	Batam	70-80	1.597.789.200		70-80	2.977.071.055
		4. Persentase rekomendasi kebijakan bidang SDA yang ditindaklanjuti dan diterapkan		100%			100%	
1	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian daerah yang ditindaklanjuti	Batam	100%	555.348.000		100%	776.167.752

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Cat Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Batam	6 Dokumen	95.974.000		6 Dokumen	213.232.331
	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Batam	4 Laporan	370.610.000		4 Laporan	519.750.240
	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi mikro Kecil;	Batam	5 Dokumen	88.764.000		5 Dokumen	43.185.181
2	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase pelaporan pelaksanaan pembangunan tepat waktu dan sesuai ketentuan;	Batam	100%	311.621.000		100%	342.745.333
	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Batam	1 Buku	109.450.000		1 Buku	159.459.676

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Cat Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Batam	1 Laporan	190.945.000		1 Laporan	119.868.335
	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Batam	2 Laporan	11.226.000		2 Laporan	63.417.322
3	Pengelolaan Barang dan Jasa	Indeks Tata Kelola Pengadaan	Batam	75-80	690.535.200		85-90	1.783.925.248
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Batam	400 Dokumen	20.545.000		400 Dokumen	139.382.819
	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Batam	50 Dokumen	562.543.200		50 Dokumen	1.327.200.346

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Cat Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Batam	450 Orang	107.447.000		450 Orang	317.342.083
4	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase rekomendasi kebijakan bidang SDA yang ditindaklanjuti dan diterapkan	Batam	100%	40.285.000		100%	74.232.722
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Batam	5 Dokumen	14.300.000		5 Dokumen	23.548.515
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya	Batam	5 Dokumen	12.435.000		5 Dokumen	25.463.620

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Cat Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian						
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Pertanahan	Batam	5 Dokumen	13.550.000			25.220.587

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Keberhasilan dalam pencapaian sasaran kinerja Sekretariat Daerah diwujudkan melalui 3 (Tiga) program sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
3. Program Perekonomian dan Pembangunan

Program-program diimplementasikan dalam bentuk beberapa kegiatan yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, yang dilaksanakan menjadi beberapa kegiatan yaitu :
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah
 - f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - h. Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 - i. Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
 - j. Penataan Organisasi
 - k. Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan

2. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Yang dilaksanakan menjadi beberapa kegiatan yaitu :
 - a. Administrasi Tata Pemerintahan
 - b. Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
 - c. Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
 - d. Fasilitasi Kerjasama Daerah

3. Program Perekonomian Pembangunan. Program yang dilaksanakan di rumuskan menjadi beberapa kegiatan yaitu
 - a. Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian
 - b. Pelaksanaan Administrasi Pembangunan
 - c. Pengelolaan Barang dan Jasa
 - d. Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam

Tabel : 4.1.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Kota Batam Tahun 2024:

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH

Kode		Urusan / Bidang Urusan Program / Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						C. P e n t i n g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja				
				Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Tolok Ukur	Target						
			SEKRETARIAT DAERAH												250.416.925.492,00
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN												250.416.925.492,00
4	01		SEKRETARIAT DAERAH												250.416.925.492,00
4	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												150.196.160.494,00
4	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												249.585.961,00
4	01	00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah												

4	0	0	2.	00					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	3	100 %	416.706.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			651.410.600,00
1	1	13	03						Indek Kepuasan Layanan Administrasi Umum Sekretariat Daerah Persentase Kesesuaian PMPRB dengan Indeks RB	Jumlah PD dengan nilai IKM Berkategori Baik Jumlah PD Yang Memiliki PMPRB Berkategori Baik Jumlah Sop Dilingkungan Pemkot Batam Yang Diterapkan	- Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70-80 % 15 %	100 %					
Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi																		
4	0	0	2.	00					Indek Kepuasan Layanan Administrasi Umum Sekretariat Daerah Persentase Kesesuaian PMPRB dengan Indeks RB	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	44	100 %	131.854.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			195.211.600,00
1	1	13	04						Indek Kepuasan Layanan Administrasi Umum Sekretariat Daerah Persentase Kesesuaian PMPRB dengan Indeks RB	Jumlah PD dengan nilai IKM Berkategori Baik Jumlah PD Yang Memiliki PMPRB Berkategori Baik Jumlah Sop Dilingkungan Pemkot Batam Yang Diterapkan	- Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70-80 % 15 %	100 %					
Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana																		
4	0	0	2.	00					Indek Kepuasan Layanan Administrasi Umum Sekretariat Daerah Persentase Kesesuaian PMPRB dengan Indeks RB	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1	100 %	886.749.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			788.694.100,00
1	1	13	05						Indek Kepuasan Layanan Administrasi Umum Sekretariat Daerah Persentase Kesesuaian PMPRB dengan Indeks RB	Jumlah PD dengan nilai IKM Berkategori Baik Jumlah PD Yang Memiliki PMPRB Berkategori Baik Jumlah Sop Dilingkungan Pemkot Batam Yang Diterapkan	- Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70-80 % 15 %	100 %					
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah																		
4	0	0	2.	00														
1	1	13	05															

4	0	0	2.					Jumlah Kepuasan Layanan Administrasi Umum Sekretariat Daerah Persentase Kesesuaian PMPRB dengan Indeks RB	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah PD dengan nilai IKM Berkategori Baik Jumlah PD Yang Memiliki PMPRB Berkategori Baik Jumlah Sop Dilingkungan Pemkot Batam Yang Diterapkan	- Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70-80 % 15 %	1 Dokumen	100 % 100 % 100 %	219.430.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Dokumen	291.723.200,00
4	0	1	14					Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan							791.975.000,00				2.641.289.807,00
4	0	0	2.					Fasilitasi Keprotokolan											
			14					Persentase Kesesuaian PMPRB dengan Indeks RB	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Persentase Keprotokolan Pimpinan Daerah Yang Difasilitasi Sesuai Ketentuan	- Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 % 70-80 %	50 Laporan	100 %	598.175.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	50 Laporan	2.016.440.000,00
4	0	0	2.					Fasilitasi Komunikasi Pimpinan											
			14					Persentase Kesesuaian PMPRB dengan Indeks RB	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Persentase Keprotokolan Pimpinan Daerah Yang Difasilitasi Sesuai Ketentuan	- Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 % 70-80 %	36 Laporan	100 %	181.450.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	36 Laporan	500.421.807,00
4	0	0	2.					Pendokumentasian Tugas Pimpinan											
			14																

Sumber Dana

Adapun sumber dana dari keseluruhan kegiatan di Sekretariat Daerah Kota Batam untuk menjalankan program dan kegiatan bersumber dari dana APBD Kota Batam. Sekretariat Daerah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) mempunyai 3 (tiga) program yang telah dispesifikasi yaitu :

1. Program Penunjnng Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
2. Program Perekonomian dan Pembangunan

Dengan pelaksanaan ketiga program ini, maka diharapkan dapat terpenuhi pendanaan dari APBD Kota Batam.

Demikian secara keseluruhan perolehan dana yang diharapkan untuk dapat mencapai kinerja yang berkesinambungan dan berorientasi pada hasil kinerja pada Sekretariat Daerah Kota Batam.

BAB V PENUTUP

Rancangan Akhir Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Batam Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kota Batam Tahun 2021-2026. Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Batam yang memuat kebijakan program dan kegiatan yang diarahkan pada sasaran dan tujuan dengan mengacu pada visi misi Sekretariat Daerah Kota Batam. Rancangan Akhir Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2024 harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan kegiatan.
 - a. Pelaksanaan semua program dan kegiatan mengikuti petunjuk dan aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam.
 - b. Menentukan skala prioritas dengan melakukan kegiatan yang sifatnya penting guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan meningkatkan kinerja OPD
 - c. Rencana Kerja ini dapat terlaksana dengan baik apabila didukung oleh kualitas sumber daya aparatur yang memadai, sumber dana dan sarana prasarana yang cukup, koordinasi yang baik serta adanya dukungan dan partisipasi masyarakat yang tinggi .
2. Kaidah-kaidah pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut:
 - a. Sekretariat Daerah Kota Batam berkewajiban untuk mengimplementasikan pencapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kota Batam Tahun 2024 serta diselaraskan dengan RKPD Kota Batam Tahun 2024.

- b. Sekretariat Daerah Kota Batam berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Sekretariat Daerah Kota Batam Tahun 2024 dengan berpedoman kepada Renja Sekretariat Daerah Kota Batam Tahun 2024 dan RKPD Kota Batam Tahun 2024.
 - c. Untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Ranhir) sekretariat Daerah Kota Batam Tahun 2024 diwajibkan untuk melakukan pengendalian dan evaluasi program kegiatan pada tahun 2023, dari hasil evaluasi tersebut dapat diketahui langkah-langkah/solusi yang tepat untuk memperbaiki permasalahan yang ada.
 - d. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama baik internal maupun antar instansi untuk inventarisasi dan sinkronisasi dan meningkatkan hubungan kerjasama yang sinergis.
3. Rencana tindak lanjut

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kota Batam selain sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan untuk tahun 2024 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Sekretariat Daerah Kota Batam. Untuk dapat merealisasikan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rancangan Renja Sekretariat Daerah Kota Batam Tahun 2024 dipengaruhi juga oleh sumber pembiayaan/pendanaan yang memadai serta kompetensi dan semangat, tekad serta kedisiplinan dalam memprioritaskan program dan kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia.

Dengan tersusunnya Rancangan Akhir Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Batam Tahun 2024, maka akan terlihat jelas apa yang menjadi prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024. Dengan kata lain rencana kerja ini dapat berjalan dengan lancar apabila administrasi dan manajemen bisa seimbang dan berkesinambungan. Rancangan Rencana Kerja Akhir Sekretariat Daerah tahun 2024 diharapkan dapat dijadikan

acuan pada pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berikutnya sesuai dengan target yang telah ditetapkan